



BPHN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAPORAN KEUANGAN BPHN SATKER TAHUNAN (AUDITED) 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
JL. MAYJEND SOETOYO NO.10 CILILITAN , JAKARTA TIMUR 13640



Badan Pembinaan Hukum Nasional

Laporan Keuangan Tahunan Satker (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2022

Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan

Jakarta Timur 13640

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaa Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Plt Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran,



Constantinus Kristomo S.S., M.H.
NIP. 19740411 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
VI. Lampiran dan Daftar	84



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. May. Jend. Sutoyo-Cililitan No.10 Jakarta Timur

Telp. 021-8091908 Fax 021-8002265 website : www.bphn.go.id

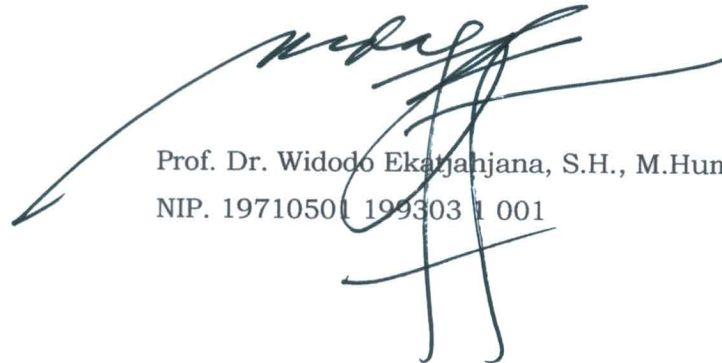
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp68.109.120 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.337.364.355 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp38.946.171.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp400.354.438.694 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp98.063.299; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp400.256.375.395; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp116.771.680 dan Rp400.237.667.014.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.512.140 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp41.751.532.325 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp41.739.020.185). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp63.944.120 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp41.675.076.065).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp403.693.026.368 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp41.675.076.065 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp49.538.524 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp38.269.255.235 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp400.237.667.014.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Buletin Teknis SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan sesuai dengan PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022		% thd Angg	TAHUN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	68.109.120	0	68.659.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	68.109.120	0,00	68.659.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	17.302.977.000	16.897.721.259	98	17.008.065.691
Belanja Barang	B.4	19.061.894.000	18.860.311.841	99	19.333.259.457
Belanja Modal	B.5	2.581.300.000	2.579.331.255	100	2.264.400.487
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		38.946.171.000	38.337.364.355	98	38.605.725.635

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	4.165.000
Persediaan	C.10	98.063.299	214.599.942
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		98.063.299	218.764.942
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.16	24.758.430.869	22.425.453.956
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	59.683.830.714	59.485.084.562
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.19	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.20	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.21	1.088.776.559	1.041.978.369
Konstruksi dalam pengerjaan	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(41.440.019.747)	(35.538.489.374)
Aset Tetap yang belum diregister	C.24	-	-
Jumlah Aset Tetap		400.256.375.395	403.579.384.513
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.25	4.184.325.500	4.184.325.500
Aset Lain-Lain	C.26	853.242.316	2.070.732.320
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.27	(5.037.567.816)	(6.252.257.820)
Jumlah Aset Lainnya		-	2.800.000
JUMLAH ASET		400.354.438.694	403.800.949.455
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	107.413.285	86.052.552
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	9.358.395	21.870.535
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		116.771.680	107.923.087
JUMLAH KEWAJIBAN		116.771.680	107.923.087
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	400.237.667.014	403.693.026.368
JUMLAH EKUITAS		400.237.667.014	403.693.026.368
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		400.354.438.694	403.800.949.455

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12.512.140	13.068.323
JUMLAH PENDAPATAN		12.512.140	13.068.323
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16.897.721.259	17.008.065.691
Beban Persediaan	D.3	618.639.650	513.396.893
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.347.522.200	9.888.298.065
Beban Pemeliharaan	D.5	3.354.965.899	2.710.578.417
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.677.081.468	6.181.085.886
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.855.601.849	5.538.950.831
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		41.751.532.325	41.840.375.783
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(41.739.020.185)	(41.827.307.460)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	50.001.111	43.669.000
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.943.009	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		63.944.120	43.669.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(41.675.076.065)	(41.783.638.460)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(41.675.076.065)	(41.783.638.460)

Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	403.693.026.368	406.657.852.575
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(41.675.076.065)	(41.783.638.460)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NO REVALUASI	E.3.6	(49.538.524)	(3.661.320)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		(49.538.524)	(3.661.320)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	38.269.255.235	38.822.473.573
EKUITAS AKHIR	E.5	400.237.667.014	403.693.026.368

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
4. Pelaksanaan administrasi BPHN
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdapat pada aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan, Modul Aset tetap dan Modul GLP. Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (*Unaudited*).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal

neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 15 kali dari DIPA awal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp250.000.000 untuk pemenuhan pergeseran kelebihan belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor SEK.3-KU.01.02-283 tanggal 06 Juli 2022 perihal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Belanja Pegawai TA 2022, Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-01.02-25 tanggal 18 Juli 2022 perihal Inventarisasi Perkiraan Kelebihan Belanja Pegawai BPHN TA 2022, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-02 tanggal 18 Juli 2022 perihal Persetujuan Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai BPHN TA 2022

dan Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-27 tanggal 19 Juli 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 (Dokumen revisi beserta surat disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).

2. Pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022 terdapat program *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp10.747.544.000 pada tahap 1 (pertama) sesuai dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-33 tanggal 09 Desember 2021 perihal Penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022 Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional dan nomor PHN-PR.01.04-35 tanggal 10 Desember 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran *Automatic Adjustment* BPHN TA 2022 serta sebesar Rp637.747.000 pada tahap 2 (dua) sesuai dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-02 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyampaian Tambahan *Automatic Adjustment* TA 2022 Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional dan nomor PHN-PR.01.04-04 tanggal 02 Juni 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran Tambahan *Automatic Adjustment* BPHN TA 2022.

Berikut adalah Tabel *Automatic Adjustment* pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022:

Tabel *Automatic Adjustment*
Badan Pembinaan Hukum Nasional
TA 2022

No	KODE	JENIS KEGIATAN	PAGU	AA I	AA II	TOTAL AA	PAGU SETELAH AA
1	1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	507.958.000	126.650.000	634.608.000	1.117.683.000
2	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	955.452.000	117.530.000	1.072.982.000	1.845.408.000
3	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.069.752.000	109.230.000	1.178.982.000	1.641.370.000
4	1613	Perencanaan Hukum Nasional	1.627.799.000	573.084.000	95.472.000	668.556.000	959.243.000
5	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.343.144.000	7.641.298.000	188.865.000	7.830.163.000	32.512.981.000
TOTAL			49.461.976.000	10.747.544.000	637.747.000	11.385.291.000	38.076.685.000

Keterangan : Dokumen *Automatic Adjustment* dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

3. Pada bulan Juli 2022 BPHN mengajukan usulan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp869.486.000 melalui surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-92 Tanggal 20 Juli 2022 perihal Usulan Buka Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan pada bulan September 2022 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-476/AG/AG.5/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Buka Blokir *Automatic Adjustment* BPHN TA 2022.

Berikut adalah tabel Pagu Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 setelah buka blokir *Automatic Adjustment*:

**Tabel Buka Blokir *Automatic Adjustment*
Badan Pembinaan Hukum Nasional
TA 2022**

No	KODE	JENIS KEGIATAN	PAGU	AA	PAGU SETELAH AA	BUKA BLOKIR	PAGU SETELAH BUKA BLOKIR
1	1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	634.608.000	1.117.683.000	173.588.000	1.291.271.000
2	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	1.072.982.000	1.845.408.000	255.000.000	2.100.408.000
3	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.178.982.000	1.641.370.000	300.000.000	1.941.370.000
4	1613	Perencanaan Hukum Nasional	1.627.799.000	668.556.000	959.243.000	-	959.243.000
5	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.343.144.000	7.830.163.000	32.512.981.000	140.898.000	32.653.879.000
TOTAL			49.461.976.000	11.385.291.000	38.076.685.000	869.486.000	38.946.171.000

4. Sehubungan dengan implementasi kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disusuli dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-PR.04.01-121 tanggal 22 November 2022

perihal Penyampaian Realokasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan Data Dukung Reviu Usulan Revisi Realokasi sesuai dengan surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-142 tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian Data Dukung Reviu Usulan Revisi Realokasi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-681/AG/AG.5/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Realokasi Sisa *Automatic Adjustment* BPHN Kemenkumham TA 2022 (dokumen Realokasi beserta surat disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).

Berikut adalah Tabel perubahan pagu anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022:

Uraian	31 DESEMBER 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI DAN REALOKASI
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	17.552.977.000	17.302.977.000
Belanja Barang	22.913.949.000	19.061.894.000
Belanja Modal	9.245.050.000	2.581.300.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	49.711.976.000	38.946.171.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 DESEMBER 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI DAN REALOKASI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	1.291.271.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	2.100.408.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.941.370.000
Perencanaan Hukum Nasional	1.627.799.000	959.243.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.593.144.000	32.653.879.000
Total Belanja	49.711.976.000	38.946.171.000

Pada tahun 2022 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dari anggaran semula sebesar Rp872.911.000 menjadi sebesar Rp403.127.000 Rincian realokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	URAIAN	Pagu	
		Semula	Menjadi
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	111.012.000	130.082.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.750.000	24.750.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	737.149.000	248.295.000
	Jumlah Belanja	872.911.000	403.127.000

Rincian Realokasi dan Realisasi Belanja Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Realisasi
Pendapatan
Rp68.109.120

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.109.120 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat estimasi pendapatan dikarenakan bukan merupakan pendapatan yang bersifat rutin sehingga tidak dapat diestimasi besarannya. Pendapatan rutin pada Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berasal dari pendapatan sewa kantin yang dibayarkan setiap 2 tahun sekali. Pendapatan atas sewa kantin BPHN disetorkan pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000. Realisasi Pendapatan Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	50.001.111	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	4.165.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	3.600.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	10.343.009	-
Jumlah	-	68.109.120	-

Realisasi Pendapatan sebesar Rp68.109.120 adalah berupa :

1. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran sewa kantin BPHN untuk Bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022.

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran perawatan AC Split Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000 sesuai dengan NTPN nomor 0DCA561QUH4DFDGE tanggal 11 Maret 2022.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reinal Saputra sebesar Rp2.255.600 sesuai NTPN nomor 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022.
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pembulatan gaji sebesar Rp9 melalui potongan SPM nomor 00006T/409288/2022 tanggal 21 Januari 2022.
5. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 berupa hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sebesar Rp8.087.400 sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022.

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50.001.111	43.669.000	14,50
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	4.165.000	24.990.000	100,00
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	3.600.000	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	10.343.000	-	100,00
Jumlah	68.109.111	68.659.000	-0,80

Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan periode sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada penyeteroran Sewa Kantin (Pendapatan atas sewa kantin BPHN disetorkan tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000).

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp38.337.364.355 Realisasi Belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.337.364.355 atau 98 % dari anggaran belanja sebesar Rp38.946.171.000. Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2022:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2022

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.302.977.000	16.897.721.259	98
Belanja Barang	19.061.894.000	18.860.311.841	99
Belanja Modal	2.581.300.000	2.579.331.255	100
Total Belanja	38.946.171.000	38.337.364.355	98
Jumlah	38.946.171.000	38.337.364.355	98

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp268.361.280 atau sebesar 0,70% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2022 lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya sebagai akibat dari adanya realokasi anggaran *Automatic Adjustment*. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.897.721.259	17.008.065.691	(0,65)
Belanja Barang	18.860.311.841	19.333.259.457	(2,45)
Belanja Modal	2.579.331.255	2.264.400.487	13,91
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	38.337.364.355	38.605.725.635	(0,70)

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp403.127.000.

Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp393.177.532 dengan rincian sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	130.082.000	127.904.941	98,33%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.750.000	24.728.329	99,91%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	248.295.000	240.544.262	96,88%
	Jumlah Belanja	403.127.000	393.177.532	97,53%

Perbandingan realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID 19 periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

***Perbandingan Belanja Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021***

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127.904.941	406.488.312	(68,53)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.728.329	24.110.390	2,56
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	240.544.262	507.138.077	(52,57)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	-	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja	393.177.532	980.268.279	(59,89)

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp587.090.747 atau 59,89% dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2022 lebih kecil dari pagu anggaran tahun sebelumnya. Rincian realisasi untuk belanja Penanganan Pandemi COVID-19 disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

*Belanja Pegawai
Rp16.897.721.259*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.897.721.259 dan Rp17.008.065.691. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi belanja pegawai DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA. 2022**

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.033.122.000	16.872.026.404	99,05
Belanja Lembur	269.855.000	258.850.000	95,92
Total Belanja Pegawai	17.302.977.000	17.130.876.404	99,01
Pengembalian		(233.155.145)	
Belanja Pegawai (Netto)	17.302.977.000	16.897.721.259	97,66

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp233.155.145 yang terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.665 melalui potongan SPM;
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT Pengelola Barang dan Jasa atas nama Kartika Butar Butar dan Shanaz Iriani sebesar Rp370.000 melalui potongan SPM;
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Suami PNS Bulan Januari 2022 a.n Pegawai Marthina W sebesar Rp295.060 sesuai NTPN nomor 04D495uDPHI2VK7U tanggal 23 Februari 2022;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Beras Suami PNS Bulan Januari 2022 a.n Marthina W sebesar Rp72.420 sesuai NTPN nomor E1AA57N8P6MRPIUO tanggal 23 Februari 2022;
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 pegawai a.n Dwi Agustin dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT sebesar Rp2.160.000 melalui potongan SPM;
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 30 Pegawai dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT sebesar Rp21.090.000 melalui potongan SPM;

7. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp177.120.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk Bulan Januari-November 2022 sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;
8. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS THR sebesar Rp14.040.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;
9. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural Gaji ke-13 sebesar Rp17.820.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;
10. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Pegawai sebesar Rp185.000 karena dilantik menjadi JFT Pengadaan Barang dan Jasa a.n Nur Pramesti melalui potongan SPM.

Perbandingan realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.872.026.404	16.845.224.571	0,16
Belanja Lembur	258.850.000	166.106.000	55,83
Jumlah Belanja Kotor	17.130.876.404	17.011.330.571	0,70
Pengembalian Belanja Pegawai	(233.155.145)	(3.264.880)	7.041,31
Jumlah Belanja	16.897.721.259	17.008.065.691	(0,65)

Perbandingan realisasi belanja pegawai Periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp110.344.432 atau sebesar 0,65% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini antara lain dikarenakan adanya pengembalian belanja tunjangan struktural pns akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Belanja Barang
Rp18.860.311.84
1

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.860.311.841 dan Rp19.333.259.457. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi Belanja Barang DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
TA. 2022**

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	3.567.219.000	3.563.178.816	99,89
Belanja Barang Non Operasional	2.592.252.000	2.516.183.125	97,07
Belanja Barang Persediaan	584.190.000	583.180.152	99,83
Belanja Jasa	3.261.695.000	3.247.770.126	99,57
Belanja Pemeliharaan	3.279.755.000	3.273.888.754	99,82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.775.941.000	5.685.923.275	98,44
Belanja Perjalanan Luar Negeri	842.000	-	-
Total Belanja Barang	19.061.894.000	18.870.124.248	98,99
Pengembalian		(9.812.407)	
Belanja Barang (Netto)	19.061.894.000	18.860.311.841	98,94

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp9.812.407 yang terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang tiket dan hotel perjadiin asistensi PERDA di Sulawesi Tenggara sebesar Rp2.365.200 sesuai dengan NTPN nomor C2D718JM919EO3HB tanggal 08 September 2022;
2. Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa Pengembalian selisih Honorarium Narasumber Kegiatan Pertemuan Nasional karena Narasumber sebesar Rp157.500 sesuai dengan NTPN 181D32CNQ78PUMCI tanggal 23 November 2022;
3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Pengembalian Uang Harian Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyelarasan NA RUU untuk 3 hari sebesar Rp450.000 sesuai dengan NTPN nomor AB02E395A1R6BGK7 tanggal 23 November 2022;
4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian selisih biaya transport dalam rangka kegiatan Temu Pakar Konsultasi Penyusunan Naskah sebesar Rp127.128 sesuai NTPN nomor 382916QR9C4OSSCH tanggal 19 Desember 2022;
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa selisih harga tiket pesawat perjalanan dinas ke Sumatera Barat dalam rangka Kegiatan Hearing Prolegnas sebesar Rp4.960 sesuai NTPN nomor

- 1FF4E1GAACMEFBJR tanggal 20 Desember 2022;
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang tiket pesawat perjadi kegiatan evaluasi program kegiatan dan anggaran kegiatan BPHN TA 2022 di Kanwil Maluku sebesar Rp322.967 sesuai NTPN nomor 60D712CNQ78QT2B2 tanggal 23 Desember 2022;
 7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang hotel kegiatan peliputan peresmian desa sadar hukum di Bali sebesar Rp120.000 sesuai NTPN nomor D50BB2CNQ78QT87G tanggal 23 Desember 2022;
 8. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang hotel dan pesawat kegiatan perjadi kegiatan analisis dan evaluasi hukum di Kanwil Bangka Belitung sebesar Rp296.600 sesuai NTPN nomor B3C1A395A1R7A3FB tanggal 23 Desember 2022;
 9. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjadi dalam rangka kegiatan pengumpulan dan supervisi data terkait evaluasi program anggaran dan kinerja TA 2022 sebesar Rp252.092 sesuai NTPN nomor 7BF587N8P6N5C05K tanggal 27 Desember 2022;
 10. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan berupa Pengembalian Honorarium Anggota pokja AE Keuangan Digital sebesar Rp637.500 sesuai NTPN nomor AOABF45IPSDJP2U0 tanggal 29 Desember 2022;
 11. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang hotel kegiatan pengawasan organisasi bantuan hukum di Bandung sebesar Rp1.260.000 sesuai NTPN nomor F62652CNQ78QV0AG tanggal 29 Desember 2022;
 12. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Pengembalian uang harian 1 hari kegiatan pembahasan DPHN di Surabaya sebesar Rp410.000 sesuai NTPN nomor FDDF88JM919HQ35V tanggal 29 Desember 2022;
 13. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa selisih uang hotel eselon 2 ke eselon 4

kegiatan pembahasan DPHN di Surabaya sebesar Rp820.000 sesuai NTPN nomor 750D945IPSDJP162 tanggal 29 Desember 2022;

14. Pengembalian Belanja Bahan berupa Pengembalian pembelian makan dan snack kegiatan penyuluhan keliling sebesar Rp5.600 sesuai NTPN nomor 29CC445IPSDJP5C4 tanggal 30 Desember 2022;
15. Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa Pengembalian honorarium narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Hukum sebesar Rp170.000 sesuai NTPN nomor 31A067N8P6N5DD4M tanggal 30 Desember 2022;
16. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Lampung sebesar Rp250.000 sesuai NTPN nomor E2F660JSQI425D52 tanggal 30 Desember 2022;
17. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Bali sebesar Rp20.160 sesuai NTPN nomor 3B4B66QR9C4P0EG3 tanggal 30 Desember 2022;
18. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang penginapan eselon 2 perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Bandung sebesar Rp425.000 sesuai NTPN nomor 4926F5209N00679D tanggal 30 Desember 2022;
19. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas peresmian Desa Sadar Hukum di Jawa barat sebesar Rp395.000 sesuai NTPN nomor 7A7767N8P6N5DA4E tanggal 30 Desember 2022;
20. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas peresmian Desa Sadar Hukum di Bali sebesar Rp272.700 sesuai NTPN nomor E977E5209N00683V tanggal 30 Desember 2022;
21. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas pengawasan Organisasi Bantuan Hukum di Jember sebesar Rp800.000 sesuai NTPN nomor 53C067N8P6N5DBBQ tanggal 30 Desember

2022;

22. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum di Lampung sebesar Rp200.000 sesuai NTPN nomor FAA432CNQ78QV8MU tanggal 30 Desember 2022;

23. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum di Cirebon sebesar Rp50.000 sesuai NTPN nomor E0EF345IPSDJP5J0 tanggal 30 Desember 2022;

Perbandingan realisasi belanja barang Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Barang
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.563.178.816	3.810.770.114	(6,50)
Belanja Barang Non Operasional	2.516.183.125	2.740.564.265	(8,19)
Belanja Barang Persediaan	583.180.152	585.604.670	(0,41)
Belanja Jasa	3.247.770.126	3.365.144.130	(3,49)
Belanja Pemeliharaan	3.273.888.754	2.678.567.392	22,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.685.923.275	6.224.504.286	(8,65)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	18.870.124.248	19.405.154.857	(2,76)
Pengembalian Belanja	(9.812.407)	(71.895.400,00)	(86,35)
Jumlah Belanja	18.860.311.841	19.333.259.457	(2,45)

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 2,45 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021, hal ini dikarenakan pagu anggaran tahun 2022 lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya sebagai akibat dari adanya realokasi anggaran *Automatic Adjustment*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp403.127.000 dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp393.177.532 atau sebesar 97,53 persen dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	130.082.000	127.904.941	98,33%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.750.000	24.728.329	99,91%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	248.295.000	240.544.262	96,88%
	Jumlah Belanja	403.127.000	393.177.532	97,53%
	Pengembalian		-	
	Jumlah Belanja Netto	403.127.000	393.177.532	97,53%

Belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berupa pembelian lisensi aplikasi zoom, biaya Swab test antigen dan PCR test pegawai, Desinfeksi Kantor BPHN, *Hand Sanitizer dan Tissue, Zone Air Disinfectant*, APD, Madu, Masker dan Multivitamin CDR untuk Pegawai. Rincian realisasi belanja barang untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Berikut adalah Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

***Perbandingan Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021***

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127.904.941	406.488.312	(68,53)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.728.329	24.110.390	2,56
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	240.544.262	507.138.077	(52,57)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	-	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja	393.177.532	980.268.279	(59,89)

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 TA. 2022 mengalami penurunan sebesar 59,89 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun anggaran 2022 lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021 sebagai akibat dari adanya realokasi anggaran *Automatic Adjustment*.

Belanja Modal
Rp2.579.331.255

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.579.331.255 dan Rp2.264.400.487. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,91 bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021.

Berikut tabel perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.333.786.913	2.171.941.430	7,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19	0	42.531.500	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.746.152	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	46.798.190	49.927.557	(6,27)
Jumlah Belanja Kotor	2.579.331.255	2.264.400.487	13,91
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.579.331.255	2.264.400.487	13,91

Berikut adalah tabel Pagu dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.335.310.000	2.333.786.913	99,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.990.000	198.746.152	
Belanja Modal Lainnya	47.000.000	46.798.190	99,57
Total Belanja Modal	2.581.300.000	2.579.331.255	99,92
Pengembalian		-	
Belanja Modal (Netto)	2.581.300.000	2.579.331.255	99,92

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.579.331.255 merupakan Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset pada Neraca, yang berupa :

1. 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000),-
2. 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasangannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);
3. 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
4. 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
6. 2 Unit Sice untuk keperluan Kantor BPHN sebesar Rp17.982.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.782.000);
7. 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);
8. 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172);
9. 1 Paket Buku-buku dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp3.677.600;
10. Perbaikan Ruangan Lantai Dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022 sebesar Rp198.746.152 (sudah termasuk pajak).
11. 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776 Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);
12. 1 set buku UDC (Universal Decimal Classification) sebesar Rp8.250.000 (sudah termasuk pajak);
13. 1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
14. 5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);

- 15.15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
- 16.18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
- 17.1 Paket Buku-Buku Hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum sebesar Rp21.139.829 (sudah termasuk pajak);
- 18.1 Paket Buku-Buku Hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum sebesar Rp8.794.950 (sudah termasuk pajak);
- 19.1 Paket Buku-Buku Hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum sebesar Rp4.935.811 (sudah termasuk pajak);
- 20.12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
- 21.2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
- 22.2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 23.2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 24.1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 25.2 unit alat *citotec cervijet* (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
- 26.1 Tripod Libec 650EX Proffesional For Camcorder-DSLR-Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
27. Perangkat Ligting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- 28.1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- 29.1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);

30.1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Berikut adalah rincian Realisasi Belanja Modal Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disajikan pada tabel:

Rincian Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2022

No	Akun	Nomor SP2D	Nilai SP2D	Keterangan
1	532111	221391303007058	19.525.000	Meja Kantor BPHN
		221391303007729	96.944.100	10 Unit AC Split
		221391302009161	340.000.000	Komputer Meja
		221391302009138	173.990.000	Komputer Jinjing
		221391302023447	856.800.000	3 Unit Kendaraan
		221391303020605	17.982.000	2 Unit Sice
		221391303029614	11.045.600	3 Unit Lemari Es
		221391303031049	32.000.000	10 Unit Printer
		221391302045516	15.684.300	5 unit Water
		221391302047088	3.350.000	1 unit kulkas 2
		221391303038060	30.000.000	5 unit LCD
		221391303038302	176.925.000	15 Pcs Acer
		221391303039339	212.310.000	18 Pcs Acer
		221391301043330	151.869.218	12 set Peralatan
		221391303047060	49.498.000	2 unit komputer
		221391302063645	34.000.000	2 unit Scanner
		221391302063646	14.000.000	2 unit Televisi Aqua
		221391303048986	19.000.000	1 unit Kamera
		221391302065409	12.200.000	2 unit alat citotec
		221391701007472	3.197.658	1 Tripod Libec 650EX
		221391701007472	25.717.026	Perangkat Ligting
		221391701007472	18.428.051	1 Unit Gimbal Stabilizer
		221391701007472	7.920.960	Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN
		221391701007472	11.400.000	1 Unit Kursi Polaris
2	533121	221391303007702	198.746.152	Renovasi Ruang
3	536111	221391303020604	3.677.600	Buku-buku Hukum
		221391303037645	8.250.000	1 set buku UDC
		221391303040445	21.139.829	Buku-buku Hukum
		221391303042480	8.794.950	Buku-buku Hukum
		221391303047059	4.935.811	Buku-buku Hukum
JUMLAH			2.579.331.255	

Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2022.

Rincian Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00%
	Jumlah Belanja	0	0	0,00%

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja modal penanganan Pandemi Covid 19 periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Perbandingan Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	42.531.500	-
Jumlah Belanja Kotor	0	42.531.500	-
Pengembalian Belanja	-	0	-
Jumlah Belanja	0	42.531.500	-

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran atau pun realisasi belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2022.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.333.786.913

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.333.786.913 dan Rp2.214.472.930. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 5,39 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.333.786.913	2.171.941.430	7,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	2.333.786.913	2.214.472.930	5,39
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.333.786.913	2.214.472.930	5,39

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp2.333.786.913 merupakan Pembelian yang akan menambah nilai dan kuantitas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca, berupa:

1. 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000),-
2. 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasangannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);
3. 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
4. 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
6. 2 Unit Sice untuk keperluan Kantor BPHN sebesar Rp17.982.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.782.000);
7. 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);
8. 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172);
9. 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776 Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);

- 10.1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
- 11.5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 12.15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
- 13.18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
- 14.12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
- 15.2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
- 16.2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 17.2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 18.1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 19.2 unit alat *citotec cervijet* (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
- 20.1 Tripod Libec 650EX Proffesional For Camcorder-DSLR-Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
21. Perangkat Ligting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- 22.1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- 23.1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);
- 24.1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 pada Tahun Anggaran 2022.

Rincian Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022

Akun	URAIAN	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00%
	Jumlah Belanja	0	0	0,00%

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja modal penanganan Pandemi Covid 19 periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	43.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	43.531.500	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	0	-
Jumlah Belanja	0	43.531.500	(100,00)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp198.746.152*

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp198.746.152 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan 100 persen dari tahun sebelumnya, dikarenakan tidak adanya pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2021. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2022	REALISASI 31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.746.152	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	198.746.152	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	198.746.152	0	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.746.152 adalah perbaikan Ruangan Lantai Dua Gedung Annex Kantor BPHN.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp46.798.190*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp46.798.190 dan Rp49.927.557. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan 6,27 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik (Turun) %
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan (monografi)	46.798.190	49.927.557	(6,27)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	46.798.190	49.927.557	(6,27)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	46.798.190	49.927.557	(6,27)

Belanja Modal Lainnya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 sebesar Rp46.798.190 adalah berupa pembelian

Buku-Buku dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp3.677.600;
2. Pembelian 1 set buku UDC (*Universal Decimal Classification*) sebesar Rp8.250.000;
3. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp21.139.829;
4. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp8.794.950;
5. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp4.935.811.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo UP	Rp -	Rp -
Kwitansi UP belum di SPJ kan	Rp -	Rp -
Kuitansi TUP yang belum di SPJ kan	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelapora

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp0)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp4.165.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pada 31 Desember 2022 saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebesar Rp0 karena telah dilakukan penyetoran pembayaran sewa kantin BPHN untuk periode 1 Juni - 30 September 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022.

*Persediaan
Rp98.063.299*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Masing-masing adalah sebesar Rp98.063.299 dan Rp214.599.942. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	98.063.299	214.599.942
Jumlah	98.063.299	214.599.942

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-01 tanggal 2 Januari 2023.

C.11 Persediaan Belum Diregister

*Persediaan Belum
diregister Rp0*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti

Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp0)*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp356.165.357.00
0*

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	356.165.357.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2022	356.165.357.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 31 Desember 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	11.348 m ²	Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur	356.165.357.000
Jumlah			356.165.357.000

Saldo aset tetap berupa Tanah seluas 11.348 m² terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat Nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp24.758.430.869

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp24.758.430.869 dan Rp22.425.453.956 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	22.425.453.956
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.333.786.913
Transfer Masuk	0
Perolehan Hasil tindak lanjut normalisasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan nilai berkurang	(810.000)
Penghapusan karena penjualan	
Saldo per 31 Desember 2022	24.758.430.869
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(19.957.797.804)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	4.800.633.065

Mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.333.786.913 adalah berasal dari Transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pembelian sebagai berikut:

- a. 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000),-
- b. 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasangannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);
- c. 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
- d. 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X

- sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
 - f. 2 Unit Sice untuk keperluan Kantor BPHN sebesar Rp17.982.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.782.000);
 - g. 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);
 - h. 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172);
 - i. 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776 Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);
 - j. 1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
 - k. 5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - l. 15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
 - m. 18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
 - n. 12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
 - o. 2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
 - p. 2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - q. 2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - r. 1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);

- s. 2 unit alat *citotec cervijet* (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
- t. 1 Tripod Libec 650EX Professional For Camcorder-DSLR-Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
- u. Perangkat Ligting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- v. 1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- w. 1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);
- x. 1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp810.000 adalah berupa Koreksi pencatatan nilai berkurang sebagai akibat adanya koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 yang salah input transaksi 190 seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan kesalahan pengisian tahun perolehan pada saat proses Normalisasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0*

C.17 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.59.683.830.71
4*

C.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp59.683.830.714 dan Rp59.485.084.562. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	59.485.084.562
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	198.746.152
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2022	59.683.830.714
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(21.482.221.943)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	38.201.608.771

Mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.746.152 adalah merupakan perbaikan Ruangan Lantai Dua Gedung Annex Kantor BPHN.

C.19 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

*Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0*

Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dan Rp0.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp1.088.776.559*

C.21 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.088.776.559 dan Rp1.041.978.369 . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.041.978.369
Mutasi tambah:	
Pembelian	46.798.190
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2022	1.088.776.559
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.088.776.559

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.088.776.559 pada periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp3.677.600;
2. Pembelian 1 set buku UDC (*Universal Decimal Classification*) sebesar Rp8.250.000;
3. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp21.139.829;
4. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp8.794.950;

5. Pembelian 1 Paket Buku-buku Hukum (Monografi) dalam rangka kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp4.935.811.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp41.440.019.747)*

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp41.440.019.747) dan (Rp35.538.489.374). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.758.430.869	19.957.797.804	4.800.633.065
2	Gedung dan Bangunan	59.683.830.714	21.482.221.943	38.201.608.771
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.088.776.559	0	1.088.776.559
		85.531.038.142	41.440.019.747	44.091.018.395

*Aset Tak
Berwujud
Rp4.184.325.500*

C.24 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.184.325.500 dan Rp4.184.325.500 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum

Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.184.325.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi	-
Saldo per 31 Desember 2022	4.184.325.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(4.184.325.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud periode 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan
Software :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya	0
Jumlah	4.184.325.500

Aset Lain-Lain
Rp853.242.316

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp853.242.316 dan Rp2.070.732.320 . Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan yang berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan akan diajukan untuk proses penghapusan dari BMN . Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	2.070.732.320
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN karena penjualan	(1.217.490.004)
Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan)	
Saldo per 31 Desember 2022	853.242.316
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(853.242.316)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi kurang sebesar Rp1.217.490.004 adalah berupa penghapusan BMN karena penjualan, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-10.PB.05.05 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan karena penjualan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).

Berikut adalah tabel rincian Aset Lain-lain pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2022:

Rincian Aset Lain-Lain Periode 31 Desember 2022

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3.01.03.05.005	Sumersible Pump	Unit	1	229.812.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	9.395.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	50	565.570.316
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	8	48.465.000
TOTAL			60	853.242.316

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp5.037.567.816)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp5.037.567.816) dan (Rp6.252.257.820). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Jumlah	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Lain-lain	853.242.316	(853.242.316)	0
Jumlah	5.037.567.816	(5.037.567.816)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.27 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp107.413.285

C.28 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp107.413.285 dan Rp86.052.552. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2022.

Berikut adalah Tabel pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2021 dengan nomor ID 547100163555	51.704.129	Dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303000256
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2021 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079	33.185.255	Dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303000248
3	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2021	1.163.168	Dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303001170
Jumlah Total		86.052.552	

Pada 31 Desember 2022 terdapat saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp107.413.285 yang berupa tagihan listrik dan telepon Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada bulan Januari 2023.

Rincian utang pihak ketiga periode 31 Desember 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut :

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	39.189.068	Tagihan Listrik Kantor BPHN I periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
		67.159.197	Tagihan Listrik Kantor BPHN II periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
		1.065.020	Tagihan Telepon Kantor BPHN periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
Jumlah		107.413.285	

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp9.358.395*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.358.395 dan Rp21.870.535 . Pendapatan Diterima di Muka merupakan

pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp9.358.395 adalah Pendapatan atas sewa kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000 dan sudah diakui sebagai pendapatan untuk waktu 15 Bulan (Oktober s.d Desember 2021 serta Januari s.d Desember 2022) sebesar Rp15.631.605.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Ekuitas
Rp400.237.667.01
4*

C.32 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBPN
Rp12.512.140*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.512.140 dan Rp13.068.323. Berikut adalah perbandingan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.512.140	13.068.323	(4,26)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	-
Jumlah	12.512.140	13.068.323	(4,26)

Pendapatan LO sebesar Rp12.512.140 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN selama 12 Bulan (1 Januari s.d 31 Desember 2022) yang berasal dari Pendapatan sewa kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000.

Beban Pegawai

Rp16.897.721.259

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.897.721.259 dan Rp17.008.065.691 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah rincian Beban Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Rincian Beban Pegawai
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	11.016.042.260	11.197.144.700	-1,62
Beban Pembulatan Gaji PNS	173.563	167.364	3,70
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	722.330.890	734.722.156	-1,69
Beban Tunj. Anak PNS	198.491.572	195.352.728	1,61
Beban Tunj. Struktural PNS	666.630.000	928.650.000	-28,22
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.383.689.000	898.245.000	54,04
Beban Tunj. PPh PNS	86.033.294	81.866.903	5,09
Beban Tunj. Beras PNS	579.649.680	586.746.840	-1,21
Beban Uang Makan PNS	1.785.186.000	1.973.529.000	-9,54
Beban Tunjangan Umum PNS	200.645.000	245.535.000	-18,28
Beban Uang Lembur	258.850.000	166.106.000	56
Jumlah	16.897.721.259	17.008.065.691	-0,65

Beban Persediaan
Rp618.639.650

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp618.639.650 dan Rp513.396.893. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Berikut adalah rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	618.639.650	513.396.893	20,50
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	618.639.650	513.396.893	20,50

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.347.522.200 dan Rp9.888.298.065. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Berikut adalah Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.229.591.875	3.211.889.952	0,55
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.042.000	5.671.850	(11,10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	200.640.000	186.720.000	7,46
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127.904.941	406.488.312	(68,53)
Beban Bahan	1.763.952.052	1.494.005.818	18,07
Beban Honor Output Kegiatan	381.142.500	629.280.000	(39,43)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	370.445.473	617.278.447	(39,99)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	1.114.944.297	936.021.270	19,12
Beban Langganan Telepon	13.502.300	14.407.976	(6,29)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	399.600.000	396.000.000	0,91
Beban Sewa	1.112.240.000	950.726.363	16,99
Beban Jasa Profesi	365.672.500	447.970.000	(18,37)
Beban Jasa Lainnya	22.300.000	84.700.000	(73,67)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	240.544.262	507.138.077	(52,57)
Jumlah	9.347.522.200	9.888.298.065	(5,47)

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat beban barang dan jasa penanganan pandemi covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Jumlah
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	127.904.941
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	240.544.262
Jumlah	368.449.203

*Beban
Pemeliharaan
Rp3.354.965.899*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.354.965.899 dan Rp2.710.578.417. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.857.508.466	1.301.582.587	42,71
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.379.620.333	1.325.351.355	4,09
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	117.837.100	83.644.475	40,88
Beban Persediaan suku Cadang	0	0	0,00
Jumlah	3.354.965.899	2.710.578.417	23,77

Realisasi Pemeliharaan periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,77 persen bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena:

1. Adanya peningkatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 berupa:
 - Belanja Pemeliharaan/Peningkatan fungsi sarana lingkungan gedung kantor BPHN (jalan, taman, dll) sebesar Rp95.887.000;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp1.761.621.466.

2. Adanya peningkatan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 berupa:

- Pemakaian habis pakai bahan persediaan untuk pemeliharaan selama periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.837.100;

*Beban Perjalanan Dinas
Rp5.677.081.468*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.677.081.468 dan Rp6.181.085.886. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.378.073.614	3.143.916.791	7,45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	352.670.000	349.750.000	0,83
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	386.444.000	834.925.095	-53,72
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.559.893.854	1.852.494.000	-15,79
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0,00
Jumlah	5.677.081.468	6.181.085.886	(8,15)

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp5.855.601.849

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.855.601.849 dan Rp5.538.950.831. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.891.952.316	1.554.148.409	21,74
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.960.849.533	3.952.004.672	0,22
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	5.852.801.849	5.506.153.081	6,30
Beban Amortisasi Software	-	26.903.750	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.800.000	5.894.000	(52,49)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	2.800.000	32.797.750	(91,46)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.855.601.849	5.538.950.831	5,72

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam

suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp0). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	(00,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	(00,00)
Jumlah	0	0	(00,00)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp63.944.120

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	50.001.111	43.669.000	0,00
Pendapatan dari Pemindahtangann BMN Lainnya	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.600.000	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.343.009	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	63.944.120	43.669.000	46,43

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2022 sebesar Rp63.944.120 adalah berupa:

1. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.600.000 berupa pengembalian kelebihan bayar perawatan AC Split TA. 2021 sesuai NTPN nomor 0DCA561QUH4DFDCE tanggal 11 Maret 2022;
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.255.600 berupa Pengembalian Kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reinal Saputra sesuai NTPN 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022;
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp9 berupa Pembulatan Gaji melalui potongan SPM 00006T/409288/2022 tanggal 21 Januari 2022;
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.087.400 berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022;
5. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 berupa hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp403.693.026.368*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp403.693.026.368 dan Rp406.657.852.575.

*Defisit LO
(Rp41.675.076.065)*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp41.675.076.065) dan (Rp41.783.638.460). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp49.538.524)*

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(49.538.524) dan Rp(3.661.320). Koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp49.538.524 disebabkan adanya:

1. Adanya Koreksi SPM dikarenakan kesalahan penggunaan akun atas Pembayaran Belanja Barang Sesuai kontrak no PHN.1.PB.02.01-25/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan BAST no PHN.1.PB.02.01-49 tanggal 23 Maret 2022 dan BAP no PHN.1.PB.02.01.53 tanggal 24 Maret 2022 perihal perbaikan ruangan lantai dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022, yang semula menggunakan akun 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) menjadi 533121

(belanja penambahan nilai gedung dan bangunan). Pada modul aset, koreksi tersebut dicatat pada menu RUH - Pencatatan transaksi BMN – Perubahan - Koreksi Perubahan Nilai Bertambah yang menghasilkan susut transaksional sebesar Rp48.383.524;

2. Koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 dikarenakan terjadi salah input transaksi 190, seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan kesalahan input tanggal perolehan pada saat proses Normalisasi, sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK. Koreksi tersebut menghasilkan Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.155.000.

Berikut adalah Tabel rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi:

***Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
per 31 Desember 2022***

No	Tanggal	Uraian	Nilai	Keterangan
1	14/09/2022	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	48.383.524	Susut transaksional atas koreksi kesalahan akun belanja gedung dan bangunan menggunakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
2	30/12/2022	Koreksi Pencatatan	1.155.000	Koreksi atas tindak lanjut normalisasi rak kayu tahun 2021
		Jumlah	49.538.524	

*Koreksi Lain-Lain
(Rp0)*

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp38.269.255.235*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp38.269.255.235 dan Rp38.822.473.573. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Berikut adalah tabel rincian transaksi antar entitas periode 31 Desember 2022:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(68.109.120)
Ditagihkan ke Entitas Lain	38.337.364.355
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	38.269.255.235

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp68.109.120) adalah berupa :

1. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran sewa kantin BPHN untuk Bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2022 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022.

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran perawatan AC Split Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000 sesuai dengan NTPN nomor 0DCA561QUH4DFDGE tanggal 11 Maret 2022.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reainal Saputra sebesar Rp2.255.600 sesuai NTPN nomor 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022.
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pembulatan gaji sebesar Rp9 melalui potongan SPM nomor 00006T/409288/2022 tanggal 21 Januari 2022.
5. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 berupa hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022;
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.087.400 berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022.

Sedangkan DKEL sebesar Rp38.337.364.355 berupa transaksi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Periode 31 Desember 2022

Akun	Uraian	Transaksi belanja
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 16.872.026.404
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp (233.155.145)
5122	Belanja Lembur	Rp 258.850.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 3.563.178.816
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 2.516.183.125
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	Rp (643.100)
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 583.180.152
5221	Belanja Jasa	Rp 3.247.770.126
5211	Pengembalian Belanja Jasa	Rp (327.500)
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 3.273.888.754
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 5.685.923.275
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp (8.841.807)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.333.786.913
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 198.746.152
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 46.798.190
Jumlah Total		Rp 38.337.364.355

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada Periode 31 Desember 2022 tidak terdapat Transfer Masuk pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berikut adalah Tabel Rincian Transfer Masuk pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2022:

Transfer Masuk	Nilai
Peralatan dan Mesin	-
Penyusutan Transfer Masuk (Peralatan dan mesin)	-
Jumlah	-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir
Rp400.237.667.0
14

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 telah dilakukan jurnal balik atas jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2021 sebesar Rp21.870.535 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 17 Januari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp51.704.129 sesuai SP2D nomor 221391303000256 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada tanggal 17 Januari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp33.185.255 sesuai SP2D nomor 221391303000248 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
4. Pada tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp1.163.168 sesuai SP2D nomor 221391303001170 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
5. Pada tanggal 21 Februari 2022 telah dilakukan pembayaran sewa kantin BPHN untuk bulan Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN CAE501JNFC5QV9EF (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);

6. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan jurnal koreksi reklas beban atas ketidaktepatan penggunaan akun persediaan yang dikarenakan kesalahan pemilihan kodefikasi barang persediaan pada modul komitmen sebesar Rp19.807.900;
7. Terdapat Utang kepada pihak ketiga terkait Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 107.413.285 yang terdiri dari Tagihan Listrik Kantor BPHN Bulan Desember 2022 Rp39.189.068 dengan no ID 547100717100 dan 547102931079, Tagihan Listrik Bulan Desember 2022 Rp67.159.197 dengan no ID 547100163555 dan Tagihan Telepon Kantor BPHN Bulan Desember 2022 Rp1.065.020 yang sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 30 Desember 2022;
8. Pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka diakhir Desember 2022 atas Sewa Kantin BPHN Tahun 2021 yang bernilai Rp24.990.000 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp9.358.395;
9. Terdapat belanja modal pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp 2.579.331.255, belanja modal tersebut berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.333.786.913, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp198.746.152 dan belanja modal lainnya sebesar Rp46.798.190. Belanja modal yang terealisasi tersebut mempengaruhi penambahan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya pada Neraca sebesar Rp2.578.521.255 sehingga terdapat selisih sebesar Rp810.000 (koreksi nilai berkurang pada peralatan dan mesin). Hal ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 yang salah input nilai transaksi, seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan

kesalahan pengisian tahun perolehan pada saat proses Normalisasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.

10. Pada tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan jurnal koreksi atas belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Modul GLP sebesar Rp198.746.152. Jurnal Koreksi tersebut dilakukan sebagai akibat adanya koreksi SPM karena kesalahan penggunaan akun atas Pembayaran Belanja Barang Sesuai kontrak no PHN.1.PB.02.01-25/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan BAST no PHN.1.PB.02.01-49 tanggal 23 Maret 2022 dan BAP no PHN.1.PB.02.01.53 tanggal 24 Maret 2022 perihal perbaikan ruangan lantai dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022, yang semula menggunakan akun 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) menjadi 533121 (belanja penambahan nilai gedung dan bangunan) sebesar Rp198.746.152. Jurnal Koreksi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar Rp198.746.152 karena transaksi pemeliharaan gedung dan bangunan yang semula membentuk Beban Pemeliharaan telah berubah menjadi transaksi Belanja Penambahan Nilai gedung dan Bangunan sehingga telah menambah Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebagaimana tercatat dalam Neraca.

F.3 Tindak Lanjut Temuan

Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas kesalahan pencatatan dalam proses Normalisasi ketika input transaksi (kode 190), tercatat senilai Rp1.925.000 seharusnya Rp1.115.000 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp810.000, dan kesalahan penginputan pengisian tahun perolehan yang tercatat pada 02 Februari 2020 seharusnya 02 Februari 1920. Atas temuan tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan atas nilai dan tahun perolehan rak kayu

pada modul aset, sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022.

No	Pemeriksaan (BPK/Itjen)	LHP/Hasil Pemeriksaan Tahun	Temuan	Tindak Lanjut
1	Pemeriksaan BPK	Konfirmasi Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi	Terdapat selisih 810.000, karena terjadi kesalahan ketika Input Transaksi 190 seharusnya 1.115.000, Terdapat juga kesalahan pengisian tahun perolehan seharusnya 02-02-1920	Telah dilakukan koreksi pencatatan atas nilai dan tahun perolehan rak kayu pada modul aset sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022.